

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara di dunia berusaha meningkatkan ekonomi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh penduduknya. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menghilangkan kemiskinan absolut, pembangunan adalah proses multidimensi yang memerlukan perubahan signifikan dalam struktur sosial, mentalitas, dan kelembagaan negara. (Todaro, 2003)

Ketimpangan antardaerah adalah konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketidakeimbangan yang signifikan dalam tingkat pembangunan antara berbagai wilayah dapat berdampak pada pertumbuhan daerah tersebut. Selain sebagai tujuan utama, pembangunan ekonomi adalah target yang dikejar oleh semua negara, termasuk Indonesia, bersama dengan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan Ekonomi adalah upaya dan kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, menciptakan lebih banyak peluang kerja, mengurangi disparitas pendapatan, memperkuat keterkaitan ekonomi antar wilayah, serta mengalihkan perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. (Widodo, 2006)

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan meliputi sejumlah hal, mulai dari konsentrasi aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, penyaluran investasi, perbedaan geografis, kemudahan perdagangan antar wilayah, hingga perbedaan dalam sumber daya alam antardaerah tersebut. (Teguh, 2004)

Dalam proses pembangunan ekonomi, kemampuan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dapat berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya di daerah tersebut. Dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia, beberapa daerah dapat mempercepat pertumbuhannya, sementara di daerah lain

masih mengalami stagnasi dalam perekonomiannya. Perbedaan dari pembangunan ekonomi di setiap daerah menyebabkan timbulnya ketimpangan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. (Hartono, 2008)

Perbedaan pembangunan antardaerah disebabkan oleh diantaranya ketersediaan sumber daya alam, konsentrasi kegiatan ekonomi, kondisi demografi, alokasi dana pembangunan, dan mobilitas yang kurang lancar, antar daerah. Dengan demikian kemampuan daerah dalam mempercepat peningkatan pertumbuhan perekonomian dan melancarkan proses pembangunan yang beragam. Akibatnya, suatu daerah memiliki bagian yang relatif maju (*developed region*) dan terbelakang (*underdeveloped region*). (Sjafrizal, 2018)

Ketimpangan antar wilayah di Indonesia masih menjadi hambatan besar bagi inisiatif pembangunan nasional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dinilai masih tinggi, terutama antara Wilayah Indonesia Bagian Barat (KBI) dan Wilayah Indonesia Timur (KTI). Pada tahun 2022 juga sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi penyumbang terhadap perekonomian Indonesia. Misalnya Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto sebesar 56,48%, disusul Pulau Sumatera sebesar 22,04%, dan Kalimantan sebesar 9,23% (BPS, 2022). Oleh karena itu, salah satu prioritas utama agenda pembangunan nasional adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Ketimpangan antar daerah juga mencerminkan keberadaan daerah yang masih dianggap sebagai daerah tertinggal di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2020, tercatat 62 kabupaten yang secara resmi diidentifikasi sebagai daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, daerah tertinggal didefinisikan sebagai kabupaten yang memiliki perkembangan wilayah dan penduduknya yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di tingkat nasional. Penetapan suatu daerah sebagai daerah tertinggal didasarkan pada kriteria seperti kondisi ekonomi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, stabilitas keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Sebagai contoh, di Provinsi Sumatera Barat, terdapat tiga kabupaten yang

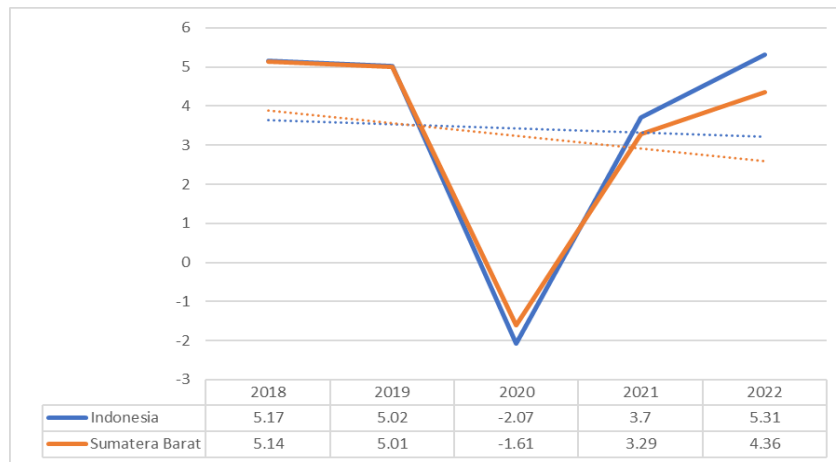
termasuk dalam kategori daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Ketimpangan di Indonesia belum terpecahkan. Ketimpangan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia bagian timur, barat, dan tengah, namun juga antar kabupaten di provinsi. Kontribusi produk domestik bruto (PDB) suatu daerah yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kesenjangan pembangunan ekonomi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi telah lama dipandang sebagai tanda keberhasilan proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pembangunan dapat teratasi karena berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. (Susilowati, 2015)

Namun di negara berkembang seperti Indonesia, sering terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan daerah lain. Kesenjangan ini, serta kesetaraan gender dan upaya pembangunan infrastruktur, telah lama menjadi masalah yang umum di Indonesia, terbukti dalam berbagai program pembangunan infrastruktur seperti proyek padat karya, jaringan sosial, dan upaya. Membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, listrik, telepon, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan di pedesaan.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam proses pembangunan ekonomi, baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di tingkat nasional. Selama periode 2018-2022, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat terlihat sangat positif, bahkan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini selalu mendekati pencapaian nasional. Untuk melihat perbandingan antara pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dan rata-rata nasional, dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini.

**Gambar 1. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)**



*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (data diolah)*

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah tidak selalu berarti terjadi peningkatan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduk wilayah tersebut. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan. Berdasarkan data BPS, dilihat dari nilai pertumbuhannya, Sumatera Barat menempati urutan ke-5 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tumbuh dengan laju tahunan sebesar 3,24% selama lima tahun terakhir. Dan dibandingkan dengan banyak daerah lain di Pulau Sumatera masih tergolong lambat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera sebesar (4,09%), diikuti oleh Bengkulu (3,49%), Jambi (3,47%), Sumatera Utara (3,33%) dan Sumatera Barat (3,24%). Namun, selama lima tahun terakhir (2018-2022), laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat berfluktuasi, dengan tren menurun pada 2018-2022.

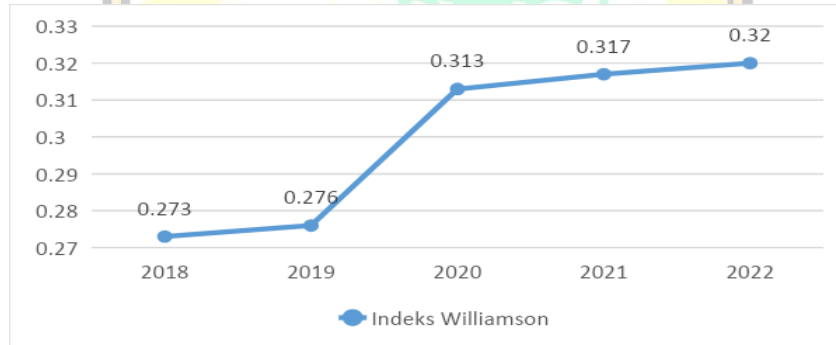
Pembangunan wilayah harus mempertimbangkan potensi dan aspirasi yang muncul dari penduduk yang tinggal dan berkembang di sana. Jika pelaksanaan prioritas pembangunan wilayah tidak sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, maka pemanfaatan sumber daya yang tersedia tidak akan maksimal. Kondisi ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan memperburuk ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) muncul ketika tidak ada upaya untuk meratakan pembangunan ekonomi. (Lubis, 2016)

Ketimpangan ekonomi digunakan sebagai parameter untuk mengukur perbedaan dalam pendapatan individu, baik itu perbedaan antara berbagai tingkat pendapatan, sektor pekerjaan, atau daerah tertentu. Untuk menilai pendapatan per individu di suatu wilayah, metode yang umum digunakan adalah membagi Produk Domestik Bruto Regional wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya. Alternatif lainnya adalah menggunakan pendapatan perorangan, yang bisa diestimasi dengan mempertimbangkan pendekatan konsumsi. (Widiarto, 2001)

Indeks Williamson merupakan salah satu dalam mengukur ketimpangan pembangunan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat, yang dapat ditunjukkan pada grafik perkembangan Indeks Williamson di Sumatera Barat dari tahun 2018-2022 dibawah ini

**Gambar 1. 2 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022**



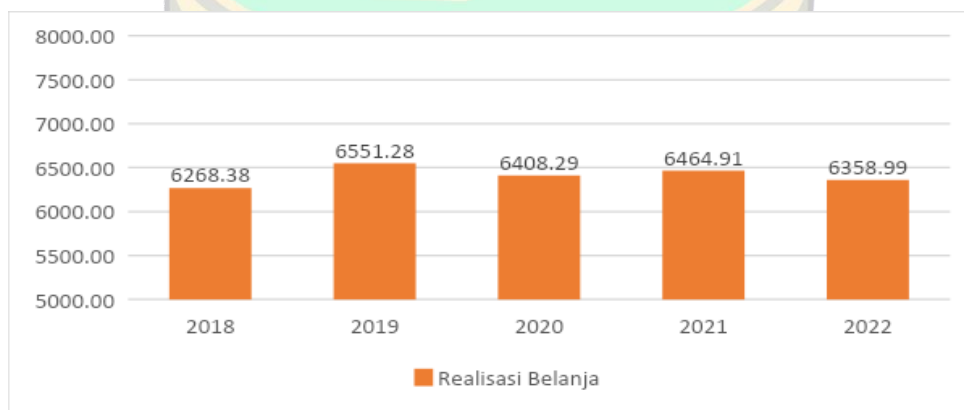
*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 (data diolah)*

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2022, ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Indeks Williamson tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun maka hal ini akan menyebabkan pembangunan yang semakin tidak merata. Peningkatan ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat ini dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peningkatan ketimpangan pembangunan pada tahun 2018 - 2022 ini diduga adalah belanja daerah, PDRB Perkapita, Aglomerasi dan dana Indeks Pembangunan Manusia.

Terdiri dari 19 kabupaten dan kota, Provinsi Sumatera Barat cukup berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta distribusi sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap kabupaten atau kota. Karena kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber nilai tambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi juga beragam, maka kesenjangan ini menjadi hambatan bagi upaya pemerataan pembangunan. Sayangnya, tidak semua daerah di Provinsi Sumatera Barat mempunyai peluang yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan atau perbedaan antar wilayah.

Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah, intervensi pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Peran pemerintah dapat dilihat dari belanja publik yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan dampaknya di dalam pembangunan ekonomi dengan belanja pemerintah dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dengan kebijakan atau inisiatif program yang didukung dengan adanya produktivitas sumber daya. (Dhyatmika et al, 2013)

**Gambar 1. 3 Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**



*Sumber: djpk kemenkeu,2023 (data diolah)*

Berdasarkan grafik 1.2 dapat diamati belanja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai Rp 6.268,38 miliar. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,19% dari tahun

2019. Dan juga terjadi penurunan sebesar 1,64% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dengan demikian hal ini menandakan ketimpangan akan terjadi apabila belanja pemerintah terus mengalami penurunan.

Belanja pemerintah daerah di Sumatera Barat menunjukkan peran pemerintah yang belum optimal dalam menggerakkan perekonomian dikarenakan selama lima tahun terakhir tidak ada peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Penyebab utamanya adalah alokasi anggaran yang belum optimal, sehingga pengeluaran tersebut belum menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan secara keseluruhan. Lebih spesifik lagi, pengeluaran tersebut belum berhasil mengurangi tingkat kemiskinan atau mengatasi kesenjangan antar daerah, mengurangi tingkat pengangguran, atau memicu pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pengalokasian anggaran untuk belanja modal masih belum mendominasi di berbagai kementerian dan lembaga, dan seringkali penggunaannya tertumpuk di akhir tahun anggaran. Alasan lain mengapa pengeluaran pemerintah dianggap belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan antar wilayah adalah karena terbatasnya fleksibilitas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, terdapat beberapa jenis pengeluaran rutin yang tidak dapat dihindari atau bersifat mengikat (*mandatory spending*), seperti pengeluaran untuk pegawai, transfer dana ke daerah, pembayaran utang, serta kewajiban alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap situasi ketimpangan antar wilayah di Sumatera Barat selama ini dan bagaimana hubungannya dengan pengeluaran pemerintah yang telah dilaksanakan.

Belanja pemerintah daerah di Sumatera Barat menunjukkan peran pemerintah yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian. Diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar karena adanya belanja pemerintah daerah sehingga mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Ada dampak positif dan negatif dari ketimpangan. Ketimpangan memiliki efek yang positif karena memotivasi daerah yang kurang berkembang untuk bersaing dan meningkatkan kesejahteraan dengan mendorong pertumbuhan. Disisi lain, efek

negatif dari ketimpangan yang ekstrim diantaranya stabilitas sosial dan solidaritas yang lemah, serta inefisiensi ekonomi. Dimana Temuan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Yasni (2020) dimana Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Namun penelitian dari Radeza, et al (2022) yang dimana pada penelitian tersebut Belanja Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

PDRB per kapita merupakan ukuran kemakmuran penduduk suatu wilayah. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. (Sasana, 2001)

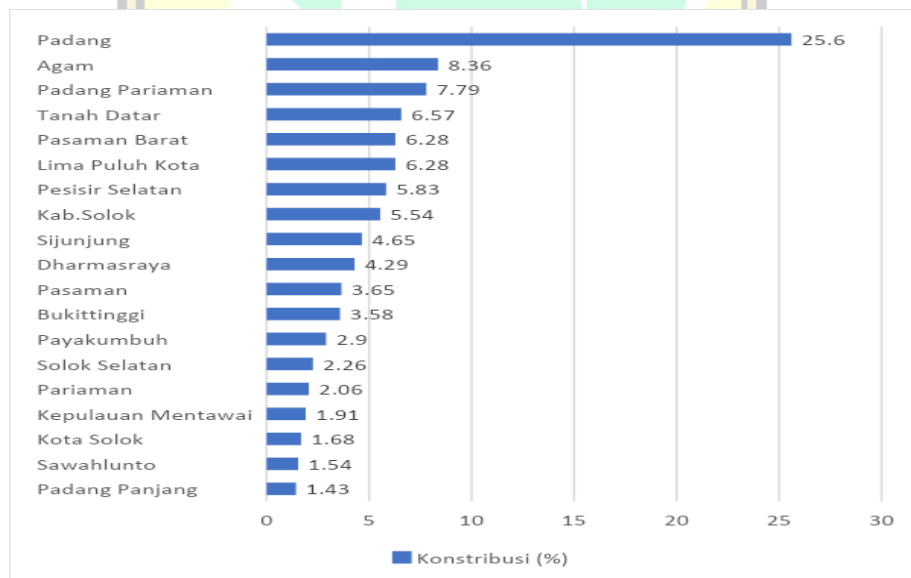
PDRB per kapita sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut memiliki potensi pendapatan yang tinggi, karena ini mencerminkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduk di wilayah tersebut. Maka semakin tinggi PDRB per kapita, semakin makmur penduduk suatu wilayah tersebut. (Thamrin, 2001) Dengan kata lain, ketika pendapatan tinggi dan merata di seluruh wilayah, ketimpangan pembangunan akan berkurang. Temuan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Kumar et al (2020) yang dimana pada penelitian tersebut PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

Selain PDRB Perkapita, Ketidakmerataan dalam pembangunan antar wilayah dapat dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Konsentrasi ekonomi, yang sering kali diterapkan oleh berbagai wilayah, termasuk Provinsi Sumatera Barat, dalam bentuk aglomerasi, dapat mempengaruhi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Aglomerasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Marshall, terjadi ketika suatu industri memilih lokasi produksi yang memungkinkan beroperasi dalam jangka panjang, sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dengan mendirikan usaha di sekitar lokasi tersebut. (Syafriзал, 2008)



Tingkat aglomerasi yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disebabkan fakta bahwa aglomerasi meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rata-rata. Namun, kepadatan yang berlebihan akan mengakibatkan keterbelakangan lebih lanjut dari daerah tersebut. Akibatnya, jika kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada satu daerah, ketimpangan antardaerah bisa melebar. dan relevan dengan penelitian Bonet (2006) dengan menggunakan aglomerasi produksi untuk menghitung kontribusi PDRB di daerah terhadap total PDRB atau Pembentukan PDRB di daerah tersebut, yang menemukan korelasi positif antara aglomerasi dan disparitas antardaerah. Akibatnya, disparitas antardaerah juga tumbuh seiring tumbuhnya aglomerasi. Temuan dari terdahulu, yaitu dari penelitian Yusica, et al (2018) yang dimana pada temuannya membuktikan aglomerasi berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

**Gambar 1. 4 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat ADHK 2010 Tahun 2022**



*Sumber: BPS provinsi Sumatera Barat, 2023 (data diolah)*

Pada gambar 1.4 diatas di Sumatera Barat terlihat bahwa distribusi PDRB per daerah tidak merata. Terdapat beberapa daerah yang memberikan kontribusi besar dan kecil terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022, Kota Padang merupakan penyumbang PDRB Sumatera Barat terbesar yaitu sebesar 25,60%, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan penyumbang terkecil PDRB

Sumatera Barat yaitu hanya sebesar 1,43%. Ditinjau dari struktur perekonomiannya, kontribusi Kota Padang yang cukup signifikan adalah pengaruh sektor perdagangan, transportasi dan industri yang memberikan nilai tambah yang besar, dan struktur perekonomiannya Kota Padang panjang juga didominasi oleh sektor perdagangan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dengan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat secara merata, yang dapat dilihat melalui indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat produktivitas penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat IPM yang ada. IPM yang rendah mengindikasikan produktivitas penduduk yang rendah, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan yang rendah. Sebaliknya, IPM yang tinggi mengindikasikan produktivitas penduduk yang tinggi, yang berarti pendapatan juga meningkat. Namun, perlu dicatat bahwa IPM bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar daerah.

Dari data BPS dari tahun ketahun bahwa Sumatera Barat termasuk dalam kategori tinggi yang mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM). dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) atau kondisi demografi. Rata-rata nilai IPM di atas 70, Hal ini menandakan bahwa SDM di Sumatera Barat semakin berkualitas. Beberapa hal dapat berdampak pada kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia, terdiri dari dimensi pendapatan, pendidikan dan kesehatan, dimana ketiga ini saling berpengaruh satu sama lain. Maka dalam meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut. Temuan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Jannah, dkk (2022) serta yang dimana hasil tersebut membuktikan bahwasanya IPM korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Namun berbeda dengan penelitian dari Lala, dkk (2023) yang dimana pada penelitian tersebut IPM berkorelasi negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan.

Ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Perbedaan pendapatan

disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, khususnya persediaan modal (*capital stock*). Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu penting bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat memperburuk ketimpangan, artinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendorong pemerataan. Ada semacam *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika fokusnya adalah pada pemerataan pendapatan. Sebaliknya, ketika pembangunan lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketimpangan justru bisa meningkat.

Dengan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menumbuhkan perekonomian mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian tentang penyebab ketimpangan pembangunan harus dilakukan secara mendalam dalam hal ini agar pemerintah dapat merancang langkah-langkah yang efektif untuk memperbaiki ketimpangan pembangunan ekonomi. Karena sumber daya yang tidak memadai, daerah tidak menikmati pembangunan dan kemajuan yang merata, dan kesulitan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak merata tidak dapat diselesaikan oleh pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Dengan Indeks Pembangunan Manusia yang berbeda antar daerah dan belanja daerah yang cukup baik di Sumatera Barat. Namun jelas masih belum mencerminkan pemerataan pembangunan, dan masih adanya kesenjangan pembangunan antardaerah, dan pemusatan (tingkat aglomerasi) yang juga dapat menimbulkan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Dengan demikian, penulis bermaksud melakukan kajian tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Penelitian ini berjudul, “**Analisis Pengaruh Belanja Daerah, PDRB Perkapita, Aglomerasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Provinsi Sumatera Barat.**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh Belanja Daerah, PDRB Perkapita, Aglomerasi dan IPM terhadap Ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2022?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas tujuan penelitian yang akan dikemukakan adalah:

“Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengaruh Belanja Daerah, PDRB Perkapita, Aglomerasi dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM), terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2022”

## 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan manfaat yang diperoleh antara lain:

### 1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai ketimpangan Pembangunan.

### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan, mampu memberikan informasi atau gambaran secara jelas tentang ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat dan sebagai pedoman atau rujukan bagi proses pembangunan daerah.

### 3. Bagi Kepentingan Teoritis.

Dapat meningkatkan wawasan dan referensi dalam bidang ekonomi terutama mengenai ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh Belanja Daerah, PDRB Perkapita, Aglomerasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yaitu gabungan data *time series* dari tahun 2013-2022 dan data *cross section* yaitu dari 19 kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan mengetahui pembahasan yang akan diteliti maka perlu sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab dengan penulisan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan rumusan masalah yang akan diteliti serta tujuan, manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan dalam penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memuat kajian teori yang berkaitan dengan objek dari apa yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu, juga diuraikan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang serupa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penelitian dimulai dari jenis penelitian, bentuk data yang digunakan, tujuan spesifik penelitian, metode apa yang dipakai dalam penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas dan menguraikan yang akan memuat hasil temuan serta pembahasan dan menginterpretasi dari pengolahan data yang telah dilakukan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis penelitian yang diperoleh dan menjawab hipotesis penelitian serta implikasi yang terjadi dari analisis penelitian tersebut.